



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MENYIASATI DEFISIT APBN DENGAN STRATEGI YANG INKLUSIF

Fauzan Lazuardi Ramadhan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fauzan.ramadhan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2025 mencetak defisit sebesar Rp21 triliun atau setara dengan 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski defisit ini masih sesuai dengan target fiskal tahunan, namun perubahan dari kondisi bulan sebelumnya yang mengalami surplus sebesar Rp4,3 triliun, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, menilai bahwa pembalikan yang cepat dari surplus ke defisit bisa menjadi sinyal adanya tekanan fiskal yang perlu diwaspadai. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian agar ruang fiskal tidak semakin menyempit, terlebih di tengah tingginya beban subsidi yang harus ditanggung negara. Achmad Maruf menambahkan bahwa belanja negara yang cenderung meningkat perlu diimbangi dengan penerimaan negara agar tidak menimbulkan defisit yang lebih lebar.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan defisit APBN dipicu oleh realisasi pendapatan yang lebih kecil dari belanja negara. Hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target tahunan. Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, sebesar Rp683,3 triliun, diikuti oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebesar Rp188,7 triliun, dan Kepabeanan dan Cukai, sebesar Rp122,9 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari alokasi tahun 2025, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp322 triliun.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, berpendapat bahwa meskipun ada penurunan belanja negara, hal tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, kontribusi belanja terhadap pertumbuhan pada kuartal pertama 2025 tercatat minus 0,08 persen. Padahal, pemerintah telah membuka blokir anggaran di 99 Kementerian/Lembaga (K/L), dengan total nilai mencapai Rp129 triliun hingga pertengahan Juni 2025.

Pembukaan blokir anggaran ini dinilai belum cukup efektif karena lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional K/L baru, bukan untuk belanja yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan refokusing dan realokasi anggaran yang lebih terencana.

Perubahan APBN dari surplus menjadi defisit dalam waktu singkat perlu dicermati secara hati-hati. Apabila pembukaan blokir anggaran tidak diikuti dengan perencanaan yang matang dikhawatirkan akan memperlebar defisit anggaran di akhir tahun. Maka dari itu, perlu disusun strategi yang matang untuk menciptakan APBN yang sehat, kuat, dan kredibel agar bisa menjadi penopang yang kuat bagi agenda pembangunan.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain, *pertama*, optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu potensi besar berada pada *shadow economy* yang berasal dari sektor informal dan *illegal* yang berpotensi menghasilkan Rp663 triliun pada tahun 2025. Pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dinilai mampu mengamankan penerimaan negara baik dari segi pencegahan maupun penindakan, khususnya kegiatan *illegal* seperti kegiatan *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging*, dan lain sebagainya.

Kedua, perencanaan dan peruntukan alokasi anggaran yang lebih terfokus dan disertai dengan *Key Performance Indicator* (KPI). Dengan adanya KPI, *government spending* dapat diarahkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas belanja negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, pengendalian terhadap defisit APBN merupakan suatu keharusan. Penggunaan APBN yang lebih sehat, kuat, dan kredibel diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Atensi DPR

Kemenkeu mencatatkan defisit APBN pada Mei 2025 mencapai Rp21 triliun terhadap PDB. Defisit ini dikhawatirkan merupakan sinyal bahwa adanya tekanan fiskal, mengingat pada bulan sebelumnya APBN mengalami surplus. Menanggapi hal ini, DPR RI melalui Komisi XI perlu mendorong Kemenkeu untuk dapat meningkatkan penerimaan negara, baik melalui intensifikasi maupun diversifikasi penerimaan, agar tidak menimbulkan defisit yang lebih lebar. Hal ini mengingat kebutuhan pendanaan dan subsidi pemerintah yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi XI DPR RI perlu mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kemenkeu melakukan perencanaan pengalokasian penganggaran dengan pendekatan konsep holistik, integratif, tematik, dan spasial agar menjadikan APBN yang lebih sehat, kuat, kredibel, dan mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

Sumber

antaranews.com, 18 Juni 2025;
bisnis.com, 17 Juni 2025;
cnnindonesia.com, 17 Juni 2025;
detik.com, 18 Juni 2025;
kontan.co.id 18 & 19 Juni 2025;
Koran Jakarta, 18 & 19 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*